

BAB II

KEBIJAKAN PEMUKIMAN HINDU DI KASHMIR

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya kebijakan India untuk membangun pemukiman umat Hindu di Kashmir beserta isi dari kebijakan itu sendiri. Sebagai pendahuluan akan dibahas sejarah konflik India-Pakistan terkait dengan Kashmir, akan tetapi dalam pembahasannya hanya berfokus pada perebutan wilayah. Kemudian juga akan dibahas munculnya gerakan perlawanan di Kashmir yang memicu terusirnya kaum *pandit* dari wilayah Kashmir sebagai hasil dari konflik berkepanjangan yang terjadi di Kashmir. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai pemukiman Hindu yang meliputi kerjasama antara Pemerintah Pusat India dengan Pemerintah Negara Bagian Kashmir sebagai proses dikeluarkannya kebijakan serta bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut hingga reaksi dari internal Kashmir.

2.1 Latar Belakang Kebijakan

Sub-bab ini akan menggambarkan latar belakang kebijakan India dalam membangun pemukiman Hindu di Kashmir, dimulai dari kronologi konflik Kashmir pasca terpisahnya India dan Pakistan pada tahun 1947, munculnya gerakan perlawanan di Kashmir hingga terusirnya umat Hindu dari Kashmir pada tahun 1989. Kebijakan India untuk membangun pemukiman Hindu di Kashmir bertujuan untuk mengembalikan umat Hindu (*pandit*) yang terusir sehingga secara paksa meninggalkan tanah mereka di Kashmir.

2.1.1 Dinamika Konflik Kashmir

Tahun 1947, setelah mengalami kemunduran akibat Perang Dunia II Inggris menarik diri dari India yang kemudian membagi negara bekas koloni wilayahnya tersebut menjadi negara independen yang baru yaitu India dan Pakistan.⁴⁶ Mayoritas Hindu membentuk negara India di sebelah Barat sedangkan mayoritas Muslim mendirikan negara Pakistan di sebelah Timur dengan batas wilayah masing-masing.

Jammu-Kashmir, atau yang lebih sering disebut Kashmir adalah wilayah negara bagian India seluas 222.237 km² dengan penduduk 13 juta yang merupakan negara terbesar di subkontinen sebelum masa pemisahan India Pakistan.⁴⁷ Kashmir yang merupakan wilayah di antara India dan Pakistan menjadi sumber klaim oleh kedua negara. Pada tahun 1947 Maharaja yang merupakan penguasa Hindu di Kashmir belum memutuskan untuk bergabung dengan negara manapun.⁴⁸

Pemerintah Inggris yang saat itu diwakili oleh Mountbatten memberikan pilihan kepada Kashmir untuk bergabung dengan India atau Pakistan.⁴⁹ Kemudian muncul pertentangan dalam internal Kashmir antara penduduk dan raja Kashmir. Hal tersebut dikarenakan raja Kashmir yang Hindu ingin bergabung dengan India

⁴⁶ Dyan Kostermans, *65 Tahun Pakistan dan India*, diakses dalam <http://www.dw.com/id/65-tahun-pakistan-dan-india/a-16166311> (10/12/2016, 10:12 WIB).

⁴⁷ *Kashmir Demographic Data*, diakses dalam <https://www.soundvision.com/article/kashmir-demographic-data> (10/12/2016, 10:12 WIB).

⁴⁸ *India-Pakistan: Troubled Relations (Partition and Independence)*, BBC UK, diakses dalam http://news.bbc.co.uk/1/hi/english/static/in_depth/south_asia/2002/india_pakistan/timeline/1947.stm (10/12/2016, 20:15 WIB).

⁴⁹ *Kashmir Problem – Bloody Politics by Britain and Blunder by Nehru*, Sulekha: New Delhi, diakses dalam http://creative.sulekha.com/kashmir-problem-bloody-politics-by-britain-and-blunder-by-nehru_305348_blog (10/12/2016, 10:12 WIB).

sedangkan penduduk Kashmir yang mayoritas Islam ingin bergabung dengan Pakistan.⁵⁰

Berpisahnya India dan Pakistan menyebabkan Kashmir pada saat itu dikuasai oleh tiga negara yakni India mencakup 45% di bagian Tenggara dan Timur meliputi Jammu dan Kashmir, Pakistan mencakup 35% di tiga bagian (Azad Kashmir, Gilgit, dan Baltistan) di Utara dan Barat Laut, sedangkan China mencakup 20% yaitu Aksai Chin di Timur Laut Kashmir.⁵¹

Gambar 2.1 Pembagian Wilayah Kashmir



Sumber: CNN

⁵⁰ Suryani Indriastuti, 2008, *Kompleksitas Konflik Kashmir India dan Pakistan*, Jurnal Sosial Budaya dan Politik, Universitas Jember, hal. 911.

⁵¹ Denny Armandhanu, *Sejarah Konflik Puluhan Tahun India dan Pakistan di Kashmir*, CNN Indonesia, diakses dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20161003144302-113-162944/sejarah-konflik-puluhan-tahun-india-dan-pakistan-di-kashmir/> (10/12/2016. 17:00).

Meskipun secara praktik Kashmir dikuasi oleh tiga negara, India tidak benar-benar secara resmi mengakui wilayah yang diklaim Pakistan dan China.⁵² Namun Pakistan menganggap Kashmir sebagai lahan yang diperebutkan sehingga menolak klaim India atas kepemilikan Kashmir. Pakistan percaya bahwa Jammu dan Kashmir seharusnya menjadi bagian dari Pakistan karena mayoritas populasi di Kashmir adalah Muslim sedangkan India menganggap bahwa Jammu dan Kashmir adalah bagian integral dari India karena pada akhirnya berdasarkan Instrumen Aksesi Oktober 1947 Maharaja setuju untuk bergabung dengan India.⁵³ Hal tersebutlah yang kemudian menjadi dasar klaim India atas Kashmir. Namun Pakistan tidak mengakuinya sehingga hal tersebut kemudian memicu persteruan antara India dan Pakistan hingga menimbulkan perang.

Perang yang terjadi antara India dan Pakistan pada 1947 diredakan dengan adanya Resolusi PBB no 47 tahun 1948 yang menegur Pakistan untuk menghentikan agresinya, dan selanjutnya mengenai diselenggarakannya plebisit di Kashmir demi menentukan status wilayah tersebut.⁵⁴ Setelah perang Kashmir I yang terjadi dari tahun 1947 hingga 1948, wilayah Kashmir dibagi menjadi dua bagian dengan adanya batas wilayah gencatan senjata atau *Ceasefire Line* (yang kemudian dalam kelanjutannya berganti nama menjadi *Line of Control/LoC* pada

⁵² Vidyah Payapo, 2014, *Peran PBB dan SAARC dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kashmir antara India dan Pakistan*, Jurnal, Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Pramadina, hal 4.

⁵³ Schofield, Victoria, 2003, *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*, New York: I.B. Tauris, Hal 12.

⁵⁴ Herlambang Putri Utami, 2015, *Upaya Pakistan Merebut Dukungan Rakyat Kashmir Melalui Subversi*, Skripsi, Jember: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, hal. 16.

1972), hal tersebut berdasar pada resolusi Dewan Keamanan PBB pada 5 Januari 1949.⁵⁵

Berdasarkan resolusi tersebut, 2/3 Kashmir yang berada di sebelah Timur LoC ada dibawah kekuasaan administratif India dengan Srinagar sebagai ibukotanya, sedangkan 1/3 lainnya berada di bawah Pakistan dengan ibukotanya Muzaffarabad yang berada di sebelah barat dengan sebutan Azad Kashmir. Azad Kashmir merupakan wilayah yang berada di perbatasan antara India dan Pakistan, namun tidak terintegrasi secara berdaulat dengan Pakistan meskipun telah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Pakistan. Sedangkan Kashmir menjadi integral dari India dan telah diresmikan dalam konstitusi India pasal 370 dengan diberikannya status khusus.⁵⁶

Wilayah Kashmir yang dikuasai India seluas 54.571 mil² (1981) terbagi menjadi 3 propinsi yaitu Jammu, Kashmir dan Ladakh.⁵⁷ Propinsi Jammu merupakan wilayah seluas 12.378 mil² dengan populasi 2.718.113 orang (Islam 29,60%, Hindu 66,25%, agama lain 4,15%), propinsi Kashmir seluas 8.639 mil² dengan populasi 3.134.904 orang (Islam 94,96%, Hindu 4,59%, agama lain 0,05%), dan propinsi Ladakh seluas 33.554 mil² dengan populasi 134.372 orang (Islam 46,04%, Hindu 2,66%, agama lain 51,30%).⁵⁸

⁵⁵ *The Future of Kashmir? Scenario One: The Status Quo*, BBC UK, diakses dalam http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/south_asia/03/kashmir_future/html/default.stm (10/12/2016, 20:30 WIB).

⁵⁶ *The Kashmiri Conflict: Historical and Perspective Intervension Analyses*, The Carter Centre, 2002, hal. 7.

⁵⁷ Lihat Lely Widyawati, *Op. Cit.*, hal. 22.

⁵⁸ *Ibid.*

India tidak menyetujui plebisit yang disarankan oleh Resolusi PBB tahun 1948, dan pada 1951 India mengadakan pemilu lembaga legislative di Kashmir yang kemudian menyetujui Kashmir sebagai bagian dari India pada 4 Februari 1956.⁵⁹ Tidak terselenggarakannya plebisit memicu terjadinya perang terbuka antara India dan Pakistan pada 1965 yang kembali diredakan dengan resolusi PBB.⁶⁰ Perang antara India dan Pakistan terjadi lagi pada tahun 1972 yang kemudian diredakan dengan adanya perjanjian Simla.⁶¹ Namun permasalahan antara India dan Pakistan terkait perebutan wilayah Kashmir tidak selesai.

2.1.2 Kashmiri Pandits dan Terusirnya Mereka dari Kashmir

2.1.2.1 Kashmiri Pandits

Seperti yang tercantum dalam ‘Oxford Dictionary of Hinduism, bahasa Sanskerta “Pandit(a)” memiliki arti sebagai orang terpelajar.⁶² Orang-orang Hindu di Kashmir menyebut diri mereka dengan kata dalam bahasa Sanskerta “Bhatta”, yang mempunyai makna ‘doctor’, yaitu sebutan dari pelajar terkemuka.⁶³ Namun mereka lebih dikenal dengan sebutan Kashmiri Pandits atau Kashmiri Hindus.⁶⁴

⁵⁹ Balraj Puri, *Kashmir Towards Insurgency*, New Delhi: 1993, Kashmir Library, hal.64-67, diakses dalam http://www.kashmirlibrary.org/kashmir_timeline/kashmir_references.htm#fn31b (15/01/2017, 12:00 WIB).

⁶⁰ *United Nations India-Pakistan Observation Mission...*, UN, diakses dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unipombackgr.html> (15/01/2017, 12:00 WIB).

⁶¹ *Simla Agreement*, STIMSON, diakses dalam <https://www.stimson.org/simla-agreement> (12/12/2016, 09:00 WIB).

⁶² W.J. Johnson, *A Dictionary of Hinduism: pandit(a)*, Oxford University Press, diakses dalam <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198610250.001.0001/acref-9780198610250-e-1832?rkey=kme8Ox&result=8> (12/12/2016, 09:00 WIB).

⁶³ W.J. Johnson, *A Dictionary of Hinduism: bhatta*, Oxford University Press, diakses dalam <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198610250.001.0001/acref-9780198610250-e-451?rkey=wdsgMZ&result=3> (13/01/2017, 13:00 WIB).

⁶⁴ Sandhya Wilhelm, B.A., 2010, *Can India Give Up Kashmir: An Option or A Risk?*, Thesis, Washington, D.C.: Faculty of The School of Continuing Studies and of The Graduate School of Art and Sciences, Georgetown University, hal. 47.

Meskipun nama mereka secara regional memiliki kaitan dengan Kashmir, banyak dari mereka (Kashmiri Pandits) yang ditemukan di kota India Utara seperti Jammu, Jaipur, Delhi, Agra, Lucknow, Allahabad, dan Beneares (Varanasi). *British India*, Lahore juga memiliki jumlah Kashmiri Pandits yang tidak sedikit. Selama Inggris berkuasa, penduduk Kashmir mendirikan Kashmiri Association of Europe, dipimpin oleh Mr. L. Zutshi, pandit Srinagar yang tinggal di Inggris awal tahun 1900.⁶⁵ Politik utama India secara signifikan dipengaruhi oleh Kashmiri Pandits yang telah menetap di luar Kashmir. Beberapa dari politikus terkemuka dan tokoh sosialis di India modern termasuk Motilal Nehru, Tej Bahadur Sapru, dan Jawarlal Nehru (Perdana Menteri pertama India) merupakan Kashmiri Pandits.

Kashmiri Pandits (Kashmiri Hindus) yang merupakan minoritas di Kashmir dibawah pemerintahan sekuler Sheikh Abdullah (Perdana Menteri Jammu & Kashmir setelah bergabung dengan India pada 1947⁶⁶), tidak sepenuhnya percaya pada Sheikh Abdullah beserta pemerintahannya. Mereka mengidentifikasi politik sekuler retorik Sheikh Abdullah sebagai cara untuk mengalihkan perhatian pemerintah pusat India. Kecurigaan mereka ditelusuri kembali pada gerakan perjuangan kemerdekaan di awal tahun 1900, di mana Muslim Conference mempengaruhi identitas Sheikh Abdullah dan partai National Conference-nya.⁶⁷

Gagasan tersebut diperkuat ketika pada tahun 1930-an, dua pemimpin Kashmiri Pandits yang dihormati, Kashyap Bandhu dan Jia Lal Kalab,

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 49.

⁶⁶ Sk. Abdullah – Sheikh Mohammed Abdullah, diakses dalam [https://www.revolvy.com/topic/Sk. %20Abdullah&item_type=topic](https://www.revolvy.com/topic/Sk.%20Abdullah&item_type=topic) (13/01/2017, 22:00 WIB)

⁶⁷ Sandhya Wilhelm, *Loc. Cit.*, hal 62.

mengundurkan diri dari National Conference.⁶⁸ Kashyap Bandhu menyebut Sheikh Abdullah lebih setia pada kepercayaannya dibandingkan nasionalismenya. Kashyap Bandhu menantang klaim Sheikh Abdullah sebagai seorang nasionalis. Sheikh Abdullah menanggapi dengan mengatakan bahwa perintah Al-Quran mengharuskannya untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Muslim. Kashyap Bandhu menekan Sheikh Abdullah lebih lanjut dengan bertanya padanya jika Sheikh Abdullah akan meninggalkan nasionalismenya apabila Quran memintanya. Sheikh Abdullah menjawab dengan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan apapun termasuk nasionalisme ketika Al-Quran dengan jelas dan terus terang memerintahkannya.

Sebagai minoritas dibawah pemerintahan sekuler yang mayoritas, cara berpikir Kashmiri Pandit terbentuk oleh rasa takut terpinggirkan. Di India, Kashmir adalah wilayah yang memiliki otonomi lebih besar dibandingkan negara bagian yang lainnya. Sebagai komunitas yang minor, dibawah pemerintahan yang prinsip sekuler-nya dipertanyakan, Kashmiri Pandits hidup dalam ketidakpastian. Mereka tinggal berdampingan dengan Muslim yang disaat itu dapat disebut sebagai lawan selama dua perang yang berhubungan dengan konflik Kashmir pada 1947 hingga 1965.

Kashmiri Pandits menyadari adanya ketidakpuasan di kalangan Muslim Kashmir tentang kurangnya identitas Muslim dalam nasionalisme Kashmir. Namun juga terdapat ketidakpuasan di kalangan Kashmiri Pandits yang disebabkan oleh

⁶⁸ *Ibid*, hal 63.

dua hal dasar tentang status Kashmir yakni:⁶⁹ 1.) Apa yang mereka klaim sebagai pemerintahan sekuler di Kashmir sebenarnya adalah pseudo-sekuler, dan 2.) kurangnya kepercayaan pada kemampuan pemerintah pusat India untuk mengontrol Kashmir. Akibatnya, Kashmiri Pandits terombang-ambing di antara identitas sekuler dan komunal.

2.1.2.2 Eksodus Kashmiri Pandits pada 1989-1990

Pakistan secara terang-terangan mendukung kekerasan dan terorisme di lembah Kashmir untuk membalas kekalahan dari Bangladesh (Perang India-Pakistan 1971 tentang India yang membantu merdekanya Bangladesh dari Pakistan), yang kemudian menyebabkan kekacauan pada tahun 1989 hingga 1990.⁷⁰ Terjadi kekerasan berupa pemerkosaan, penculikan, penyiksaan hingga pembunuhan umat Hindu di Kashmir.

September 1989, seorang aktivis politik pandit, Tika Lal Taploo ditembak mati oleh seorang separatis bersenjata di kediamannya di Kashmir, yang disusul oleh tewasnya Nilkanth Ganjoo yang pernah menjadi hakim pengadilan tinggi, pada November di tahun yang sama.⁷¹ Peristiwa tersebut mengejutkan Kashmiri Pandits dan di saat yang sama menjadi momentum meningkatnya kekerasan terhadap umat Hindu di Kashmir.

Penyerangan yang tereskalasi menjadi pembunuhan sporadis tersebut tidak hanya menyerang Kashmiri Pandit bahkan non-Kashmiri Pandit. Konflik yang

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 63.

⁷⁰ Dr. Satish Ganjoo, *A History of Kashmiri Pandits Race*, diakses dalam <http://kashmiripandit.net/Download%20Files/Kashmiri%20Pandits.pdf> (23/12/2016, 15:00 WIB).

⁷¹ Shreya Biswas, *Exodus of Kashmiri Pandits: What Happened on January 19, 26 years ago?*, India Today, diakses dalam <http://indiatoday.intoday.in/story/exodus-of-kashmiri-pandits-january-19-jammu-and-kashmir/1/574071.html> (10/04/2016, 11:42 WIB).

terkait kaum Hindu di Kashmir tersebut mulai menjadi ancaman serius ketika sasaran utama dari penyerangan oleh separatis adalah Kashmiri Pandits. Semakin banyak pembunuhan dan aktivis yang menggunakan kekerasan dan secara spesifik menjadikan masyarakat Hindu sebagai sasaran.

Saat kekerasan melanda Kashmir, ribuan dari Kashmiri Pandits meninggalkan tanah mereka dan bermigrasi ke wilayah lain di India pada awal tahun 1990. Lebih dari 100.000 Kashmiri Pandits bermigrasi selama beberapa bulan dan 160.000 lainnya benar-benar meninggalkan lembah Kashmir.⁷² Mayoritas Kashmiri Pandits yang bermigrasi ke Jammu hidup dalam tenda pengungsian pada awal tahun 1997, namun banyak dari mereka yang kemudian pindah ke wilayah yang lebih layak di Jammu ataupun kota lain di India.⁷³ Menurut data resmi, 219 Kashmiri Pandits terbunuh sejak 1989 diakibatkan oleh konflik tersebut.⁷⁴

Penyebab dari migrasi besar-besaran Kashmiri Pandits adalah pemberontakan terbuka.⁷⁵ Pada 31 Juli 1988 Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF) mengumumkan kampanye bersenjata untuk kemerdekaan Kashmir dari India yang menyebabkan terjadinya dua ledakan bom di Srinagar.⁷⁶ Penyerangan berlanjut hingga akhir tahun yang memperburuk situasi keamanan di Kashmir.

⁷² Gh. Rasool Bhat, *The Exodus of Kashmiri Pandits and Its Impact (1989-2002)*, IJRSSH 2012 – International Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Vol. No. 2, Issue No. II, Oct-Dec, New Delhi: Department of History, School of Social Science IGNOU, hal. 103.

⁷³ Omprakash Mishra, 1999, *Kashmiri Pandits: Aliens in Their Own Land*, in Sekhar Basu Roy (ed), New Approach: Kashmir, Violence in Paradise, Calcutta, hal. 121.

⁷⁴ Baba Umar, *India's 'Resettlement' of Kashmiri Hindus to Hotly Contested Region Stokes Resentment*, diakses dalam <https://news.vice.com/article/indias-resettlement-of-kashmiri-hindus-to-hotly-contested-region-stokes-resentment> (15/04/2015, 21:00 WIB).

⁷⁵ Alexander Evans, *Kashmir: The Past Ten Years*, Asian Affairs, Vol XXX, No. 1 February 1999, hal. 21-34.

⁷⁶ *Who Are the Kashmir Militants*, BBC, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-18738906> (15/04/2015, 21:00 WIB).

Penyebaran kekerasan tersebut menyebabkan Kashmir berada di bawah tekanan kelompok separatis, terutama target utama kelompok tersebut yang merupakan pejabat-pejabat Hindu.

Jumlah Kashmiri Pandits yang mulai meninggalkan lembah Kashmir pada February dan Maret 1990 mencapai angka 160.000.⁷⁷ Dua surat kabar yang berasal dari Srinagar membawa berita ancaman terhadap Kashmiri Pandits. Berita tersebut yang terbit di *Alsafa* dan *Srinagar Times* pada 16 April 1990 menyebutkan pesan ultimatum dari Hizbul Mujahideen bahwa semua Pandit dari Jammu dan Kashmir harus meninggalkan tempat tinggal mereka dalam dua hari.⁷⁸

Sebagian besar dari Kashmiri Pandits percaya bahwa mereka terusir secara paksa dari tempat tinggalnya di lembah Kashmir, baik oleh Pakistan maupun kelompok militan yang didukung oleh Pakistan, ataupun oleh intimidasi Kashmiri Muslims sebagai sebuah komunitas dominan di Kashmir. Masjid-masjid menjadi pusat peringatan, mengancam umat Hindu dan menunjukkan kepada mereka apa yang para teroris dan Kashmiri Muslim inginkan.⁷⁹

Kebijakan Pakistan menjadi akar permasalahan, berdasarkan Vijay Dhar, pada 1990 Kashmiri Pandits dipaksa untuk meninggalkan lembah Kashmir, karena menurut ahli strategi *proxy-war* Pakistan, Kashmiri Pandits mewakili India di

⁷⁷ Schofield, *Concern Over Exodus of KPs: No Communal Tension in Kashmir*, *Kashmir Times*, 8 March 1990.

⁷⁸ M.K. Teng and C.L. Gadoo, *White Paper On Kashmir*, New Delhi: Joint Human Right Comitee, Geoffery Bell and Publishers, 1991, appendix 1X, hal. 116.

⁷⁹ Pyarelal Koul, *Kashmir – Trail and Travial*, New Delhi: Suman Publication, 1996, hal. 56-57.

Kashmir.⁸⁰ Tindakan tersebut merupakan kebijakan yang disengaja dari bentuk pembersihan etnis (*ethnic cleansing*).⁸¹

Awal tahun 1990, kelompok-kelompok perlawanan seperti JKLF dan Hizbul Mujahideen menjadi sorotan utama penyebab perginya Kashmiri Pandits dari Kashmir.⁸² JKLF mendeklarasikan diri sebagai kelompok perwakilan Kashmir tanpa memandang agama. Namun mayoritas Kashmiri Pandit meninggalkan Kashmir selama JKLF berkuasa. Sebagian dari Kashmiri Pandit tetap tinggal di Kashmir karena kendala keuangan, sebagian lagi merasa bahwa kekerasan yang terjadi di Kashmir tidak akan bertahan lama dan mereka tidak ingin meninggalkan Kashmir. Jumlah pengungsi yang datang ke India semakin meningkat setiap waktunya sehingga pemerintah pusat India membangun kamp pengungsi di Delhi.

Identitas Kashmiri Hindu (Kashmiri Pandit) berhubungan dengan prinsip sekularisme India. Sebab itu mereka memperkuat klaim mereka sebagai bagian dari India dan menuntut Pemerintah India untuk memberikan perlindungan dan kembali ke Kashmir. Kashmiri Pandit mengaku bahwa India tidak responsif terhadap tuntutan mereka dan bersikeras bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab India sebagai negara.⁸³

Kashmiri Pandit bersama dengan orang-orang Kashmir lainnya yang telah datang ke India sebelum 1989 membentuk sebuah organisasi yang dinamakan All

⁸⁰ Vijay Dhar, *Trepid Resolve on Kashmir*, The Hindustan Times, 17 February 1997.

⁸¹ Maroof Raza, *Wars and No Peace Over Kashmir*, New Delhi: Lancer Publicationis, 1996, hal. 74.

⁸² Varad Sharma, *The Persecution of Kashmir's Minority Hindus*, The Diplomat, January 19 2016, diakses dalam <https://thediplomat.com/2016/01/the-persecution-of-kashmirs-minority-hindus/> (13/02/2016, 17:50 WIB).

⁸³ *Ibid.*

India Kashmiri Samiti (AIKS).⁸⁴ Kemudian pada tahun 1991 mereka memulai gerakan lain yang disebut dengan Panun Kashmir atau yang berarti “Our Kashmir”.⁸⁵ Gerakan tersebut dimulai di Jammu dengan tujuan politik yang jelas yaitu untuk menuntut sebuah tempat tinggal yang terpisah untuk Kashmiri Pandit. Kelompok nasionalis Kashmiri Hindu lainnya mendukung tuntutan kelompok tersebut untuk memisahkan wilayah Kashmir bagi rakyat yang beragama Hindu. Mereka membuat rincian tuntutan ke dalam empat agenda, yakni:⁸⁶

1. Pembatasan tempat tinggal yang terpisah untuk Kashmiri Hindu terdiri dari daerah lembah ke Timur dan Utara sungai Jhelum.
2. Menjamin hak untuk hidup, kebebasan, kebebasan berekspresi dan kepercayaan, kesetaraan serta supremasi hukum.
3. Penempatan tempat tinggal di bawah administrasi pusat dengan status ‘Union Territory’.
4. Perpanjangan hak pemindahan atas semua Kashmiri Hindu, termasuk untuk mereka yang sebelumnya meninggalkan Kashmir karena beberapa sebab.

2.2 Pemukiman Hindu di Kashmir

Pemerintah pusat India melalui partai BJP (*Bharatiya Janata Party*) mengumumkan rencana pemukiman Hindu di Kashmir pada tahun 2015 lalu. Partai *Bharatiya Janata Party* merupakan partai nasionalis Hindu yang saat ini berkuasa

⁸⁴ *All India Kashmiri Samaj*, AIKS, diakses dalam <http://www.aiks.org/> (21/01/2017, 10:00 WIB).

⁸⁵ Chandra Maurya, *Panun Kashmir Resoluton on Kashmiri Pandits*, PGurus, diakses dalam <https://www.pgurus.com/panun-kashmir-resolution-on-kashmiri-pandits/> (21/01/2017, 10:00 WIB).

⁸⁶ Behera Navnita Chadha, 2006, *Demystifying Kashmir*, Washington, DC: Pearson Longman., hal. 126.

di India dengan Narendra Modi sebagai perwakilan di parlemen India. Narendra Modi yang saat ini juga menjabat sebagai Perdana Menteri India telah lama menjanjikan keadilan bagi para Kashmiri Pandit dan merencanakan kembalinya mereka ke lembah Kashmir secara terhormat. Kebijakan untuk memukimkan kembali Kashmiri Pandit tersebut termasuk dalam program bersama *Agenda of Alliance* antara BJP dengan PDP (*People's Democratic Party*), partai yang mewakili pemerintahan Jammu & Kashmir.⁸⁷

2.2.1 Agenda Aliansi BJP-PDP Sebagai Bentuk Pemerintahan Koalisi India-Kashmir

Bharatiya Janata Party yang berarti Partai Rakyat India adalah salah satu dari dua partai politik besar di India, bersamaan dengan *Indian National Congress*.⁸⁸ BJP memenangkan pemilihan umum *Lok Sabha* ke-16 di India pada tahun 2014 lalu. Berdasarkan data resmi pada 2016, BJP yang merupakan partai sayap kanan India, juga merupakan partai terbesar India dalam perwakilannya di parlemen nasional dan majelis negara.⁸⁹

BJP yang diwakili oleh Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan pertemuan dengan DPD yang dipimpin oleh Mufti Mohammad Sayeed dalam rangka membentuk 'Agenda of Alliance' pada Februari 2015 setelah mengadakan

⁸⁷ *J&K CM Making 'U-turn' on Settlement of Kashmiri Pandits: APMCC*, Z-News India, diakses dalam http://zeenews.india.com/news/jammu-and-kashmir/jk-cm-making-u-turn-on-settlement-of-kashmiri-pandits-apmcc_1577130.html (10/04/2016, 11:30 WIB)

⁸⁸ *In Numbers: The Rise of BJP and Decline of Congress*, The Times of India, diakses dalam <http://timesofindia.indiatimes.com/india/-In-Numbers-The-Rise-of-BJP-and-decline-of-Congress/articleshow/52341190.cms> (10/04/2016, 11:30 WIB)

⁸⁹ Malik, Yogendra K.; Singh, V.B., 1992, *Bharatiya Janata Party: An Alternative to the Congress (I)?*, Asian Survey, 32(4), hal. 318-336.

negosiasi selama beberapa minggu sebelumnya.⁹⁰ Pertemuan yang diadakan selama kurang lebih satu jam tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan pemerintahan aliansi, yang kemudian diresmikan beberapa hari setelahnya di Srinagar. Hal ini akan menjadi pertama kalinya BJP berada di pemerintahan Jammu & Kashmir, satunya-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas Muslim di India. Mufti Mohammad Sayeed akan menjadi menteri utama Jammu & Kashmir, PDP dan BJP akan memiliki jumlah menteri yang sama dengan BJP sebagai wakil ketua menteri.⁹¹

Lebih lanjut, PDP dan BJP telah memasuki “Pemerintahan Aliansi” berdasarkan pada perjanjian dan agenda yang merupakan sebuah usaha untuk menemukan rekonsiliasi nasional di Jammu & Kashmir.⁹² Tujuan utama dari aliansi ini adalah untuk membentuk pemerintahan koalisi yang akan diberdayakan untuk mempercepat proses rekonsiliasi dan membangun kepercayaan di dalam ataupun di seberang Line of Control (LoC) di Jammu & Kashmir sehingga memastikan tercapainya perdamaian di negara bagian. Hal ini nantinya akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Hal tersebut dijabarkan sebagai usaha pemerintah untuk:⁹³

- a. Menghormati mandat yang diberikan oleh masyarakat,

⁹⁰ Maseeh Rahman, *India's Hindu BJP to Share Power in Jammu and Kashmir with Muslim PDP*, The Guardian: New Delhi, diakses dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/27/india-hindu-bjp-share-power-jammu-kashmir-muslim-pdp> (10/10/2016, 13:00 WIB).

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Agenda for Alliance: Full Text of the Agreement Between PDP and BJP*. DNA: Daily News & Analysis, diakses dalam <http://www.dnaindia.com/india/report-agenda-for-alliance-full-text-of-the-agreement-between-pdp-and-bjp-2065446> (10/04/2016, 20:00 WIB).

⁹³ *Ibid.*

- b. Memperkuat institusi dan memperluas ambisi demokrasi melalui politik yang terdapat di dalamnya,
- c. Menyediakan pemerintahan yang cerdas,
- d. Membawa pembangunan mandiri dan seimbang di tiga wilayah negara bagian,
- e. Serta membuat kondisi yang mempermudah penyelesaian isu-isu Jammu & Kashmir.

Tahun 2015 lalu, tepatnya Maret 2015, BJP pemerintahan koalisi di Jammu & Kashmir dengan PDP yang diwakili Mufti Mohammad Sayeed yang menghasilkan program bersama.⁹⁴ Program tersebut berisi tentang reformasi tata pemerintahan, inisiatif politik, masalah keamanan, inisiatif sosial dan kemanusiaan, serta agenda pengemngan. Terdapat sedikitnya 15 pokok dalam program minimal bersama (Common Minimum Program) dalam pemerintahan koalisi antara BJP dan PDP di Jammu dan Kashmir yang menyinggung permasalahan pemerintahan seperti politik, ekonomi dan sosial budaya di Kashmir.⁹⁵

Diantara pokok-pokok program dalam Agenda of Alliance tersebut, salah satu pokok yang penting dan mendasar adalah pengembalian dan rehabilitasi 3.50 lakh (350.000) Kashmiri Hindu (*Kashmiri Pandit*) ke lembah Kashmir.⁹⁶ Sebuah komite pemerintahan tingkat tinggi telah dibentuk untuk mengatur pelaksanaan

⁹⁴ *15 Highlights of PDP-BJP Government Agenda in Jammu and Kashmir*, New Delhi: India Today, diakses dalam <http://indiatoday.intoday.in/story/pdp-bjp-government-jammu-and-kashmir-common-minimum-programme-afspa-article-370/1/421696.html> (10/04/2016, 17:00 WIB).

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Summit Hakhoo, *BJP-PDP Struggle to Implement Agenda of Alliance*, Jammu: The Tribune India, diakses dalam <http://www.tribuneindia.com/news/jammu-kashmir/politics/bjp-pdp-struggle-to-implement-agenda-of-alliance/370282.html> (28/04/2017, 10:00 WIB).

Agenda of Alliance yang diraih antara BJP-PDP, telah mencapai banyak isu dan menyerahkan dokumen laporan pada Kelompok Menteri atau Group of Ministers (GoM) yang berisi cara dan sarana untuk mengimplementasikan beberapa bagian dari agenda aliansi.⁹⁷ Ketua Menteri Mufti Mohammad Sayeed yang merupakan bagian dari Kelompok Menteri (GoM) terdiri dari lima Menteri Kabinet PDP dan BJP yang memberi wewenang untuk mengambil tindakan dalam melaksanakan Agenda Aliansi, dimana kedua belah pihak telah sepakat sebelum pembentukan pemerintahan koalisi di Jammu & Kashmir.⁹⁸

2.2.2 Implementasi Kebijakan Pemukiman Hindu di Kashmir

Presiden Pranab Mukherjee telah menyetujui inisiasi kembalinya Kashmiri Pandits ke lembah Kashmir dengan “martabat, keamanan dan kehidupan terjamin”.⁹⁹ Bersama Presiden Pranab Mukherjee, Narendra Modi sebagai Perdana Menteri mewacanakan rencana untuk membangun pemukiman Hindu di tanah Kashmir.¹⁰⁰ Dalam manifesto pemilihan umumnya pada 2014, BJP telah berjanji untuk membatalkan Pasal 370 tentang status khusus setelah sebelumnya berunding dengan semua pemangku kepentingan.¹⁰¹

Organisasi Kashmiri Pandits menerima rencana pemerintah tersebut dengan tangan terbuka dan menganggap hal tersebut sebagai jalan keluar dari permasalahan

⁹⁷ *Breakthrough in PDP-BJP 'Agenda of Alliance'*, Daily Excelsior, diakses dalam <http://www.dailyexcelsior.com/breakthrough-pdp-bjp-agenda-alliance/> (11/11/2016, 10:00 WIB).

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Aabhasverma, *Will Ensure Kashmiri Pandits Go Back With Dignity: President*, U4U Voice, diakses dalam <http://u4uvoice.com/will-ensure-kashmiri-pandits-go-back-dignity-president/> (13/12/2015, 15:00 WIB).

¹⁰⁰ *Modi Govt to Make Special Efforts for Dignified Return of Kashmiri Pandits*, New Delhi: The Hindu, diakses dalam <http://www.thehindu.com/news/national/modi-govt-to-make-special-efforts-for-dignified-return-of-kashmiri-pandits/article6097572.ece> (12/01/2016, 13:00 WIB)

¹⁰¹ Daily Excelsior, *Loc. Cit.*

Kashmiri Pandits selama ini. Pergerakan pemerintah pusat India tersebut juga dianggap sebagai tindakan pertama Pemerintah India dalam mengatasi masyarakat pengungsi yang dikategorikan sebagai prioritas utama.

BJP (Bharatiya Janata Party) menjanjikan Kashmiri Pandits untuk kembali ke tanah kelahiran mereka. Pada tahun 2014, dokumen penyelesaian pengembalian umat Hindu Kashmir (Kashmiri Pandits) dalam program Agenda of Alliance yang diajukan BJP dan PDP disambut dengan baik oleh APMCC (All Party Migrant Coordination Committee), sebuah organisasi yang bertanggungjawab dalam pengembalian dan rehabilitasi Kashmiri Pandits.¹⁰² APMCC telah meminta semua partai politik peserta pemilu untuk memberikan cetak biru mengenai rincian tentang kembali dengan hormatnya Kashmiri Pandits ke Kashmir.¹⁰³ Partai Hindu yang mendominasi pemerintahan di Kashmir, yaitu *Bharatiya Janata Party* yang berkoalisi dengan pemerintah negara bagian Kashmir, *People's Democratic Party* telah mengumumkan rencana untuk mendirikan pemukiman dengan keamanan ketat bagi umat Hindu yang dahulu terusir atau pergi dari Kashmir, sehingga harus tinggal di wilayah lain di India maupun luar negeri seperti China.¹⁰⁴

India telah mengumumkan kebijakan untuk membantu ribuan Kashmiri Pandits kembali ke wilayah Kashmir yang dikontrol India, di mana 25 tahun yang lalu mereka terusir dari tempat tinggal mereka di lembah Kashmir. Pada tanggal 9

¹⁰² *Kashmiri Pandits Welcome BJP's Re-Settlement Plan in Vision Document*, New Delhi: India Today, diakses dalam <http://indiatoday.intoday.in/story/bjp-vision-document-kashmiri-pandits-apmcc-jammu-and-kashmir/1/404384.html> (15/10/2016, 07:00 WIB).

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Hindu Settlements In Kashmir Violate U.N. Resolutions, Says Pakistan*, diakses dalam http://www.huffingtonpost.in/2015/05/01/hindu-settlement-kashmir_n_7186606.html (10/04/2016, 22:29 WIB).

April 2015, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, melalui partai nasionalis Hindu India, *Bharatiya Janata Party* mengeluarkan kebijakan untuk membangun pemukiman Hindu dan memukimkan umat Hindu yang pernah terusir karena konflik yang terjadi pada tahun 1989 hingga 1990. Menurut data resmi yang ada, terdapat 24,202 keluarga yang mengungsi akibat pemberontakan oleh militan pada tahun 1990. Sebanyak 38,119 keluarga terdaftar dalam Departemen *Revenue and Relief* di Jammu dan Kashmir hingga sekarang.¹⁰⁵

New Delhi mengusulkan rencana untuk membuat kota-kota terpisah di Kashmir, dimana Kashmiri Hindus akan bermukim dan dijaga oleh pasukan Pemerintah India.¹⁰⁶ Pemerintah India berencana untuk mengadakan pengembalian dan rehabilitasi 350.000 Kashmiri Hindu (*Kashmiri Pandit*) ke lembah Kashmir.¹⁰⁷ Program pemukiman akan dibangun di atas tanah bekas pertanian yang dibeli dari petani. Pemukiman akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan taman bermain. Kementerian dalam negeri India menyatakan jika putusan ini telah dikoordinasikan dengan Ketua Menteri Mufti Mohammad Sayeed, pejabat wilayah setempat, untuk merehabilitasi para pengungsi.¹⁰⁸

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *India's Hindu Settler Plan Threatens to Inflamm Tensions in Kashmir*, FSRN ORG, diakses dalam <https://fsrn.org/2016/07/indias-hindu-settler-plan-threatens-to-inflamm-tensions-in-kashmir/> (04/06/2016, 23:00 WIB).

¹⁰⁷ Summit Hakhoo, *BJP-PDP Struggle to Implement Agenda of Alliance*, Jammu: The Tribune India, diakses dalam <http://www.tribuneindia.com/news/jammu-kashmir/politics/bjp-pdp-struggle-to-implement-agenda-of-alliance/370282.html> (28/04/2017, 10:00 WIB).

¹⁰⁸ Sanjeev Miglani and Fayaz Bukhari, *India Plans To Build New Townships In Kashmir To Resettle Hindus*, diakses dalam <http://in.reuters.com/article/kashmir-hindus-idINKB N0N10SC20150410> (10/04/2016, 19:26 WIB).

2.2.3 Respon Pakistan dan Internal Kashmir Terhadap Kebijakan

Agenda aliansi antara BJP (Bharatiya Janata Party) dan PDP (People's Democratic Party) yang menghasilkan kebijakan untuk pemukiman Hindu di lembah Kashmir telah memicu protes dan demonstrasi di beberapa wilayah Kashmir seperti pusat kota Lalchowk di Srinagar. Mohammed Yasin Malik, ketua gerakan *pro-independence* JKLF (Jammu-Kashmir Liberation Front) menganggap bahwa keputusan India tersebut serupa dengan pemukiman tipe Israel dimana dibangun pemukiman di tengah-tengah wilayah yang menjadi sengketa.¹⁰⁹

Partai-partai oposisi dan kelompok separatis lainnya di Jammu dan Kashmir mengecam langkah Pemerintah Jammu dan Kashmir untuk menciptakan kota-kota terpisah bagi Kashmiri Pandits di lembah Kashmir.¹¹⁰ Kebijakan tersebut dianggap akan membagi rakyat menjadi kelompok-kelompok dan menimbulkan resiko keamanan. Para pemimpin politik setempat mengkritik rencana tersebut sebagai konspirasi untuk menciptakan perpecahan komunal dengan memisahkan populasi daerah tersebut dengan berdasarkan agama.¹¹¹ Partai National Congress dan kelompok yang menolak kebijakan juga mengatakan bahwa partai tersebut menentang pemukiman terpisah yang akan dibangun.¹¹²

¹⁰⁹ Aijaz Hussain, *Kashmiris Clash with Indian Police over Settlement of Hindus*, Associated Press, Daily Mail, diakses dalam <http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3033621/Kashmiris-clash-Indian-police-settlement-Hindus.html> (19/10/2016, 10:00 WIB).

¹¹⁰ *Centre Will Make Action Plan to Secure Kashmiri Pandits in Valley: Rajnath Singh*, Jagran Post, diakses dalam <http://post.jagran.com/centre-will-make-action-plan-to-secure-kashmiri-pandits-in-valley-rajnath-singh-1428567520> (13/12/2016, 17:00 WIB).

¹¹¹ Aijaz Hussain, *Kashmir on Strikes to Protest India Plan for Hindu Townships*, Associated Press, Daily Mail, diakses dalam <http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3034634/Kashmir-strike-protest-India-plan-Hindu-townships.html> (08/08/2016, 16:00 WIB).

¹¹² *Ibid.*

Juru bicara kementerian luar negeri Pemerintah Pakistan, Tasneem Aslam menyatakan bahwa rencana India untuk memukimkan kembali puluhan ribu umat Hindu di lembah Kashmir yang sedang disengketakan merupakan sebuah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.¹¹³ Tasneem Aslam menyebutkan bahwa upaya untuk menciptakan kota atau zona khusus ataupun langkah lain untuk mengubah susunan demografis Jammu & Kashmir adalah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.¹¹⁴

Separatis Kashmir lainnya mendukung pernyataan Tasneem Aslam yang serupa dengan ketua JKLF dengan menyatakan bahwa rencana untuk membangun pemukiman Hindu di Kashmir sebagai sebuah kebijakan bergaya Israel untuk menciptakan pemukiman di wilayah yang diduduki. Sebelum itu Pakistan juga telah lama mendesak pelaksanaan resolusi PBB tentang diadakannya pemungutan suara di wilayah Kashmir (Plebisit) untuk menentukan status Kashmir, sementara India tidak menganggap PBB memiliki peran dalam sengketa Kashmir.¹¹⁵

Separatis Kashmir yang melakukan konfrontasi atas kebijakan tersebut mengklaim bahwa BJP menggunakan keadaan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal sebagai sarana untuk melanjutkan agenda mengakhiri status khusus

¹¹³ Robert Birsell, *Pakistan Says Hindu Settlement in Kashmir Violate U.N. Resolution*, Islamabad: In Reuters, diakses dalam <http://in.reuters.com/article/pakistan-india-idINKBN0NL1IK20150430> (12/12/2016, 09:00 WIB).

¹¹⁴ *Separate Townships for Kashmiri Pandits Violation of Security Council Resolution: Pak*, Srinagar: Greater Kashmir, diakses dalam <http://www.greaterkashmir.com/news/world/separate-townships-for-kashmiri-pandits-violation-of-security-council-resolutions-pak/185083.html> (12/12/2016, 10:00 WIB).

¹¹⁵ *Ibid.*

Kashmir, karena berdasarkan hukum yang berlaku saat ini orang-orang non-Kashmir tidak diizinkan untuk memiliki tanah di negara bagian Kashmir.¹¹⁶

Pemimpin tertinggi All Parties Hurriyat Conference, sebuah *umbrella organization* dari kelompok separatis dan kelompok agama, Syed Ali Syah Geelani menyatakan bahwa kebijakan terkait masalah Kashmiri Pandit digunakan oleh Pemerintah India sebagai alat untuk menciptakan sebuah negara di dalam negara.¹¹⁷ Geelani menyebutkan orang-orang Hindu harus dibawa ke Kashmir namun tidak melalui cara yang dapat mempertajam perpecahan di antara rakyat Kashmir.

Selain Pakistan, pihak oposisi dan kelompok-kelompok separatis, kelompok Kashmiri Pandit juga menolak gagasan untuk membangun pemukiman Hindu untuk rehabilitasi mereka. Kelompok Kashmiri Pandit yang menolak mengatakan bahwa harus ada kesepakatan yang disetujui dengan kaum Muslim di lembah Kashmir mengenai kembalinya Kashmiri Pandit secara legal dan terhormat.¹¹⁸ Ketua dari Kashmiri Pandit Association, Sanjay Tickoo, berpendapat bahwa kebijakan pemukiman Hindu yang dihasilkan oleh koalisi pemerintahan BJP dan PDP akan membuat Pandit rentan dan dengan keadaan yang masih dipenuhi konflik seperti sekarang ini, tidak akan ada Pandit yang ingin kembali ke lembah Kashmir.¹¹⁹

¹¹⁶ *India Sparks Anger with 'Israel-Style' Settlement Policy in Disputed Kashmir*, Jerusalem Post, diakses dalam <http://www.jpost.com/International/India-sparks-anger-with-Israel-style-settlement-policy-in-disputed-Kashmir-396719> (18/09/2016, 13:15 WIB).

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Group of Kashmiri Pandits Oppose Setting Up of Separate Settlement*, Srinagar: Indian Express, diakses dalam <http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/kashmiri-pandits-oppose-kashmir-protest-muslim-hindu-srinagar-separate-settlements-2848287/> (01/01/2017, 11:00 WIB).

¹¹⁹ *Ibid.*